

Radikalisme Islam, Pembangunan Perdamaian dan Dialog Antar Agama di Papua Indonesia

Ridwan

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
ridwan@faculty.uiii.ac.id

Diterima 30 Agustus 2022 | Direview 14 September 2022 | Diterbitkan 18 September 2022

Abstract

The objective of this study is to analyze the growth of radicalism, peacebuilding, and the role of inter-religious dialogue in Papua from a broader perspective. This paper argues that the Religious Harmony Forum (FKUB) and the Religious Leaders Communication Forum (FKPPA) have succeeded in maintaining harmony in Papua. However, the threat of religious radicalism remains an issue in the complexity of the political conflicts that occur. The Harmony Integrity Zone model in Jayapura district is an effort of inter-religious dialogue that is good enough to be replicated with modifications in other places. This paper is the result of a desk-study to fill the academic gap in transnational Islamic studies in the Land of Papua, a study that has not been explicated by researchers in the past.

Keyword: Conflict; FKUB; Inter-religious dialogue; Papua; Radicalism

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan radikalisme, pembangunan perdamaian, dan peran dialog antar-agama di Papua dari perspektif yang lebih luas. Paper ini berpendapat bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Tokoh Agama (FKPPA) telah berhasil menjaga kerukunan di Papua. Namun, ancaman radikalisme agama tetap menjadi masalah dalam kompleksitas konflik politik yang terjadi. Model Zona Integritas Kerukunan di kabupaten Jayapura merupakan upaya dialog antarumat beragama yang cukup baik untuk direplikasi dengan modifikasi di tempat lain. Tulisan ini merupakan hasil studi kepustakaan guna mengisi kekurangan kajian akademik dalam kajian Islam transnasional di Tanah Papua, sebuah studi yang belum pernah dijelaskan oleh para peneliti di masa lalu.

Kata Kunci: Dialog Antar-Agama; FKUB; Konflik; Papua; Radikalisme; Tokoh Agama

Pendahuluan

Sejak fajar reformasi 1998, Indonesia telah menyaksikan gelombang Islamisasi ruang publik, yang ditandai dengan peningkatan jumlah masjid, bank syariah, sekolah Islam tradisional, dan universitas Islam¹. Kelompok Islam transnasional, termasuk *Hizbut Tabrir Indonesia* (HTI), *Jemaah Tabligh*, dan kelompok *Salafi Wahabi*, untuk menyebut beberapa, telah beroperasi secara terbuka di Indonesia². Proses yang sama telah dan sedang berlangsung di tanah Papua secara mencolok, di mana Papua telah lama dianggap sebagai sebuah wilayah mayoritas penduduk beragama Kristen.

Dengan selesainya konflik kekerasan berbasis etnik-agama di Maluku, Sulawesi Tengah, dan Aceh (konflik beraroma separatisme), maka Papua adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih mengalami aktivitas pemberontakan yang terus menerus sejak 1960-an. Dalam hal ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah memperjuangkan

¹Martin van Bruinessen, M. (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013).

²Imdadun Rahmat, *Islam Indonesia Islam Paripurna; Pergulatan Islam Pribumi Dan Islam Nusantara*, (Jakarta: Omah Aksoro dan Forum Silaturahmi Bangsa, 2017), 10.

tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia dan telah mengubah juga, untuk beberapa derajat, pendekatannya dari kekerasan menjadi diplomasi melalui internasionalisasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap orang asli Papua. Merespon situasi ini, kelompok masyarakat sipil telah memberikan perhatian yang cukup besar, dan sampai batas tertentu, pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Ketika Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, ia bersumpah untuk lebih memperhatikan Papua dan sejak itu dia telah mengunjungi provinsi paling timur itu secara teratur dan melakukan pengembangan infrastruktur yang masif, termasuk jalan, sekolah, ruang olahraga, dan rumah sakit.

Hakikat kekerasan di Papua, atau merujuk pada Hernawan³, yang disebut sebagai “Teater kekerasan” adalah konflik politik, oleh karena konflik berlarut-larut yang terkait dengan separatisme, dan juga telah diperburuk oleh ketegangan yang menggunakan bahasa agama⁴. Tidak diragukan lagi, prasangka dan kecurigaan antara Islam dan Kristen di akar rumput seperti bara api dalam sekam, yang dapat menyala dan membakar jika ada pemicunya. Untungnya, ada *Deklarasi Papua Tanah Damai* sejak 5 Februari 2003, yang menjadi semen sosial bagi Papua. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji pertumbuhan radikalisme, pembangunan perdamaian dan peran dialog antar-agama dari sebuah perspektif yang lebih luas. Paper ini juga akan menyajikan secara ringkas kajian tentang zona integritas di Kabupaten Jayapura sebagai manifestasi dari dialog antar agama untuk perdamaian.

Metode

Kajian ini berangkat dari satu premis bahwa radikalisme agama di Papua telah hadir seiring dengan keterbukaan yang dibawa oleh Era Reformasi 1998. Dalam hal ini, gerakan Islam transnasional yang radikal telah hadir di Papua dan menciptakan ketegangan baik sesama Muslim dan non-Muslim. Kajian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan karya-karya tulis terkait tema yang sedang dikaji. Singkat kata, kajian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah perspektif yang lebih luas untuk memahami radikalisme agama di Papua, dan juga mengkaji definisi dan konsep pembangunan perdamaian dan dialog antar agama, dan melihat manifestasinya dalam kasus zona integritas kerukunan di kabupaten Jayapura, Papua. Untuk membuat sebuah kajian komprehensif, kertas kerja ilmiah ini juga melaporkan observasi panjang penulis sebagai aktivis perdamaian di Papua, dan juga hasil temuan lapangan penulis. Paper ini diandaikan mengisi gap akademik kajian-kajian Islam transnasional di Tanah Papua, sebuah tema kajian yang tidak banyak dikaji peneliti sebelumnya di masa lalu.

³B.J. Hernawan, *Torture And Peacebuilding In Indonesia : The Case Of Papua*, (Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2018), 16.

⁴Ridwan Al-Makassary, *Dialog Dan Radikalisme Agama Di Tanah Papua (Dialogue And Radicalism In The Land Of Papua)*, (Jayapura: FKUB Papua, 2016), 16-20.

Papua dan Radikalisme Agama

Setiap wilayah memiliki kontes sosial tertentu dan ancaman terhadap kerukunan dan perdamaian, tidak terkecuali di Papua. Empat ancaman utama menjaga toleransi dan perdamaian agama di Papua: *Pertama*, ekstremisme agama yang berlebihan, fanatisme; *Kedua*, primordialisme etnis berlebihan; *Ketiga*, marjinalisasi masyarakat asli Papua; *Keempat*, perubahan sosial karena banyak transmigran ke Papua⁵. Dalam usaha yang sama, International Crises Group (ICG) dalam reportnya⁶ telah menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan konflik di Papua: transmigrasi (perpindahan) komunitas Muslim dari wilayah lain Indonesia ke Papua; munculnya kelompok-kelompok eksklusif dalam Muslim dan kristen, yang memandang satu sama lain sebagai musuh; sisa-sisa mantan Jihadis dari konflik Maluku yang menetap di beberapa kota di Papua, seperti di Jayapura dan Merauke; dan hasil pembangunan yang maju di wilayah lain di Indonesia dibandingkan Papua.

Di Papua, bahasa-bahasa agama telah memperburuk konflik politik laten, terutama dengan kehadiran transmigran Muslim, yang telah bergabung atau terpapar dengan kelompok Islam transnasional di kampung halaman mereka, dan di Papua mereka mengkhotbahkan ide-ide mereka kepada Muslim lain di Papua. Oleh karena itu, pada Juni 2008, sepuluh tahun setelah dimulainya Era Reformasi 1998, International Crisis Group (ICG) melaporkan bahwa gerakan radikal telah berkembang di antara Muslim dan Kristen. Denominasi Kristen radikal termasuk Gereja Pantekosta-Karismatik/Injili, sementara kelompok Islam transnasional radikal termasuk antara lain *Hiżbut Tabrīr Indonesia* (HTI) dan Gerakan *Salafi Wahabi*. Kedua kelompok Islam ini dikategorikan sebagai Islam transnasional dalam tulisan ini, karena dicirikan oleh kecenderungan kekhalfahan/jihad⁷.

Islam transnasional, menurut Bowen⁸, merujuk pada tiga fenomena, yaitu, gerakan demografis, lembaga keagamaan transnasional, dan ranah perdebatan dan referensi Islam. Dalam fenomena pertama, Islam transnasional dapat didefinisikan sebagai Muslim yang melintasi perbatasan nasional karena alasan ekonomi dan sosial. Fenomena kedua, Islam transnasional berarti keterikatan Muslim pada lembaga-lembaga keagamaan baik yang mempromosikan gerakan lintas batas sebagai bagian dari praktik doktrinal, dan atau mencakup dan mendorong komunikasi lintas batas dalam hierarki agama. Sementara fenomena Islam transnasional ketiga, lebih berfokus pada pembentukan jaringan, konferensi, dan penambahan lembaga formal untuk refleksi sistematis di antara para sarjana. Dua fenomena terakhir saling terkait satu sama lain karena gerakan lembaga keagamaan melibatkan transfer pemikiran. Singkatnya, beberapa migran Muslim yang datang ke Papua inilah yang membawa transfer pemikiran Islam transnasional, terutama dari Timur Tengah.

⁵Kesimpulan ini dihasilkan dari sebuah strategic planning para pimpinan agama di Papua yang dilaksanakan oleh Dian-Interfidei dan FKPPA pada tahun 2015 di Kota Jayapura, Papua.

⁶International Crisis Group, *Indonesia: Communal tensions in Papua*, Asia Report No. 154 (16 June 2008).

⁷Peter Mandaville, "Muslim Transnational Identity And State Responses In Europe And The UK After 9/11: Political Community, Ideology And Authority". *Journal of Ethnic and Migration Studies: Muslims and the State in the Post-9/11 West*, Vol. 35, No. 3, 2009, 491–506.

⁸J.R. Bowen, "Beyond Migration: Islam As A Transnational Public Space". *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 30, No. 5, 2004, 879–894.

Sampai saat ini, ada lima kelompok Islam transnasional di Papua: [1] *Hizbut Tabrir Indonesia* (HTI), [2] *Salafi Wahabi* [3] *Jemaah Tabligh*, [4] *Jemaah Ahmadiyah* dan [5] *Global Ikhwan*. Pada tahun 1988, *Jemaah Tabligh* datang ke Papua dan saat ini telah berbasis di Jayapura. Anggotanya telah dan sedang menyebar ke berbagai kota di Papua⁹. *Jemaah Ahmadiyah* tiba di Papua pada tahun 2000-an dan sebagian besar cerita yang berkaitan dengan gerakan ini menyangkut penganiayaan dan fakta bahwa masjid mereka telah dikunci oleh kaum konservatif Muslim untuk mencegah *Ahmadiyah* beroperasi secara bebas. Mereka dianggap menyimpang dari ajaran Islam. *Global Ikhwan*, nama baru mantan organisasi massa *Darul Arqam*, yang telah dilarang di Malaysia, datang ke Papua pada tahun 2013. *Global Ikhwan* ini saat ini gencar mempromosikan pemberdayaan ekonomi melalui pembangunan restoran dan sekolah di banyak negara, termasuk Australia dan Indonesia.

Sebagian besar Muslim dan non-Muslim tidak menentang semua organisasi Islam transnasional yang telah disebutkan di atas. Secara umum, Muslim dan non-Muslim di Papua tidak memiliki masalah dengan warga *Jemaah Tabligh* dan *Global Ikhwan*. Non-Muslim juga tidak memiliki masalah dengan *Jemaah Ahmadiyah*. Tetapi, kaum Muslim konservatif memiliki masalah dengan *Ahmadiyah*. Sementara kelompok *Wahabi Salafi* dan HTI telah menyebabkan ketegangan dengan NU dan *Muhammadiyah*, serta dengan non-Muslim, yang menganggap kelompok transnasional tersebut radikal dan berpotensi membahayakan harmoni komunal di Papua¹⁰.

Kehadiran kelompok Islam transnasional di Papua telah menyebabkan ketidakharmonisan di antara komunitas agama. Umat Kristen khawatir karena Islamisasi yang ditandai dengan peningkatan kegiatan Islam, institusi Islam, dan organisasi Muslim. Salah satu isu laten di kalangan pemuka agama di Papua adalah Islamisasi seperti misalnya terkait dengan Uztad Fadhlán Garamatan, yang dipandang sebagai anggota HTI di Papua¹¹.

Sampai saat ini, ada berbagai insiden dan rencana pembangunan masjid telah dihentikan, dan juga rencana yang ada untuk mengubah Manokwari menjadi kota Injil¹². Masalah rancangan peraturan daerah untuk rencana ini pertama kali muncul pada tahun 2006 dan tetap diperjuangkan sebagian kalangan Kristen. Pada tahun 2007, konflik skala kecil telah terjadi di Manokwari dan Kaimana. Selain itu, berbagai surat edaran dari Perkumpulan Gereja-Gereja, khususnya GIDI, di Tolikara telah memicu ketegangan dengan umat Islam yang telah memuncak dalam Insiden Tolikara¹³. Selanjutnya, hal yang

⁹Faris A. Noor, "The Tablighi Jama'at In West Papua, Indonesia: The Impact Of A Lay Missionary Movement In A Plural Multi-Religious And Multi-Ethnic Setting". In J. Finucane and R. M. Feener (Eds.), *Proselytizing And The Limits Of Religious Pluralism In Contemporary Asia*. (Singapore: Springer, 2014).

¹⁰Observasi penulis dan berbagai diskusi dengan stakeholders di Kota Jayapura.

¹¹Ridwan Al-Makassary, *Islam Transnasional Di Tanah Papua: Proyek Jihad Ja'far Umar Thalib, Kontroversi Menara Masjid Sentani, Hizbut Tabrir Indonesia (Transnational Islam In The Land Of Papua: Ja'far Umar Talib Jihad Project, Sentani Mosque Minaret Controversy, Hizb Ut-Tabrir Indonesia)*. (Jayapura: Majelis Rakyat Papua, 2019), 172.

¹²Idrus Al-Hamid, Idrus, "Islam Politik di Papua: Resistensi dan Tantangan Membangun Perdamaian". *Millah*, XII, no. 2, 2013, 450.

¹³Ridwan Al-Makassary. *Insiden Tolikara Dan Jafar Umar Thalib Kontroversi Mushalla Yang "Dibakar" Dan Drama Jihad Di Tanah Papua*. (Jayapura: Kementerian Agama Papua, 2017), 50.

sama terjadi di Jayawijaya (2016) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (2018) tentang larangan pembangunan masjid. Hal terakhir akan diuraikan secara singkat di bagian akhir paper ini.

Kerangka Konseptual Pembangunan Perdamaian dan Dialog Antar-agama

Hingga saat ini, Papua sudah mulai menikmati apa yang disebut Johan Galtung¹⁴ sebagai “perdamaian negatif”, namun masih belum mencapai “perdamaian positif”, terkait kondisi konflik politik dan keagamaan yang terjadi. Galtung mendefinisikan “perdamaian negatif” sebagai tidak adanya konflik atau perang dan “perdamaian positif” sebagai adanya kerja sama, kesetaraan, budaya perdamaian dan dialog. Untuk mencapai perdamaian positif, beberapa kelompok masyarakat sipil di Papua, seperti *Jaringan Damai Papua* (JDP), telah melakukan upaya-upaya pembangunan perdamaian. Organisasi-organisasi ini menekankan dialog sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah Papua dan mencoba mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil lainnya di Papua.

Tidak ada definisi tunggal tentang pembangunan perdamaian. Namun, praktik pembangunan perdamaian saat ini mencerminkan definisi yang telah diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1990-an, sebagai “tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang akan cenderung memperkuat perdamaian untuk menghindari berulangnya konflik”.¹⁵ Dalam membahas Papua, penulis akan menggunakan konsep pembangunan perdamaian John Paul Laderach. Dia mendefinisikan pembangunan perdamaian sebagai “konsep komprehensif yang mencakup, menghasilkan, dan mempertahankan berbagai proses, pendekatan, dan tahapan yang diperlukan untuk mengubah konflik menuju hubungan yang lebih berkelanjutan dan damai”.¹⁶ Singkatnya, Laderach melihat pembangunan perdamaian sebagai sebuah proses.

Para pemimpin agama di Papua dalam deklarasi “Papua Tanah Damai” (PTD) pada 5 Februari 2003 telah menggemakan gagasan Laderach tentang pembangunan perdamaian. “Papua Tanah Damai” adalah sebuah konstruksi sosial yang dibuat oleh para pemuka agama untuk mencegah konflik dan membangun perdamaian di Papua.¹⁷ Namun, kedatangan kelompok Islam transnasional tampaknya menantang konsep PTD. Sampai taraf tertentu, kelompok Islam transnasional radikal seperti HTI telah mencoba membangun narasi yang mengaitkan pengikut agama Kristen dengan gerakan kemerdekaan Papua yang dikerjakan oleh nasionalis Papua dan Islam dengan kesetiaan kepada negara Indonesia¹⁸.

¹⁴Galtung, J. & Dietrich, F, *Johan Galtung: Pioneer Of Peace Research*. (Heidelberg: Springer, 2014), 16-20.

¹⁵A. Ozerdem, A., & Sung Yong, I, *International Peacebuilding: An Introduction*. (Abingdon, Oxon: Routledge, 2015), 8.

¹⁶J. P. Laderach. *Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring and Learning Toolkit*. Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame and Catholic Relief Services Southeast, East Asia Regional Office, 2007.

¹⁷B.J. Hernawan. *Torture And Peacebuilding In Indonesia : The Case Of Papua*. (Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge, 2018).

¹⁸Hasil amatan penulis dan diskusi dengan berbagai stakeholder di Kota Jayapura.

Dalam memperkuat proses pembangunan perdamaian, agama merupakan faktor yang perlu diperhatikan, seiring dengan pertimbangan ekonomi dan politik sebagai akar konflik¹⁹. Dalam hal ini, Appleby²⁰ menekankan bahwa semua agama besar memiliki tradisi yang tidak hanya dapat diaktifkan untuk melegitimasi konflik dan perang tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk mempromosikan resolusi konflik dan perdamaian tanpa kekerasan. Dalam beberapa hal, kelompok militan Islam tampaknya telah dan sedang menggunakan agama untuk melegitimasi dan membenarkan konflik. Misalnya, kemunculan Boko Haram telah menjadi hambatan yang signifikan bagi pembangunan dan pembangunan perdamaian di Nigeria.²¹ Demikian pula, Negara Islam Irak dan al-Sham (ISIS) juga telah menggunakan perintah agama untuk menargetkan komunitas non-Muslim dan Syiah di daerah-daerah di bawah pengaruh mereka²²

Sisi gelap Era Reformasi adalah konflik komunal yang meletus di beberapa daerah di Indonesia (antara lain di Ambon, Sambas, dan Sampit), yang statusnya telah selesai dengan resolusi konflik. Pada tahun 2001, kesepakatan damai dicapai untuk menyelesaikan konflik di Maluku yang menyebabkan Laskar Jihad kehilangan pengaruhnya²³. Dilaporkan bahwa Ja'far Umar Thalib, komandan Laskar Jihad, telah berencana untuk melakukan aksi jihadnya di Papua. Pada saat yang sama, Papua berada dalam kekacauan untuk menentukan nasib sendiri karena keberhasilan Timor-Timor menginspirasinya untuk menjadi sebuah negara merdeka. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Februari 2003, untuk mengantisipasi ketakutan akan munculnya JUT dan untuk menjaga perdamaian di Papua, para pemimpin agama di Papua memutuskan untuk mendeklarasikan "Papua Tanah Damai".²⁴

Deklarasi "Papua Tanah Damai" dalam praktiknya, memanifestasikan dirinya dalam kegiatan dialog lintas agama yang di antaranya diselenggarakan secara cukup intensif oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua. Secara teoritis, dialog antar-agama (*interreligious dialogue*) adalah bidang yang berkembang di Hubungan Internasional, terutama setelah tragedi 11 September 2001, serta Pemboman Madrid pada tahun 2005. Menanggapi tindakan ini, beberapa Organisasi Antar-Pemerintah, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan lembaga-lembaga keagamaan, dan Gereja Katolik, bekerja untuk mempromosikan dialog antar-agama atau dialog antariman. Di sini, penulis menggunakan dialog antar-agama dan dialog antar-iman secara bergantian.

Penting untuk memperjelas konsep agama, konflik, dan perdamaian, sebelum mengkaji perdamaian dan dialog antar agama. Agama mengacu pada berbagai bentuk pemikiran dan perilaku yang dengannya individu menjadi sadar, atau terkait dengan,

¹⁹Muhammad Abu-Nimer. *Nonviolence And Peacebuilding In Islam: Theory And Practice*. (Gainesville: University Press of Florida, 2003).

²⁰R. S. Appleby. *The ambivalence of the sacred*. (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000).

²¹A. B. Moshood & Thovoethin, P.S. *Insurgency and Development in Nigeria: Assessing Reintegration Efforts in the North-East*, *Journal of Peacebuilding & Development*, 12(2): 2017, 108-113.

²²A. N. Celso. *Zarqawi's Legacy: Al-Qaeda's ISIS "Renegade"*. *Mediterranean Quarterly*. 26(2), 2015, 21-41.

²³N. Hasan. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2006.

²⁴N. Tebay, N. 'Papua, the Land of Peace': The Interfaith Vision and Commitment for West Papua. *Exchange*, 36: 2007, 337-358.

realitas tertinggi (Tuhan). Setiap agama umumnya terdiri dari empat unsur: nilai-nilai dan kepercayaan agama, ritual, norma perilaku, dan pengakuan masyarakat. Bersama-sama elemen-elemen ini membentuk budaya hidup, mempengaruhi identitas, perilaku, dan pemikiran pribadi dan sosial.²⁵ Mohammed Abu Nimer²⁶ mendefinisikan konflik sebagai “hubungan antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang memiliki, atau berpikir mereka memiliki, tujuan yang tidak sesuai atau mungkin memiliki tujuan yang kompatibel tetapi cara, proses, pendekatan yang berbeda”. Sementara itu, dialog dapat dipahami sebagai “amannya 'wadah' bagi orang-orang untuk memunculkan asumsi mereka, untuk mempertanyakan persepsi dan penilaian mereka sebelumnya”.²⁷

Hubungan antara agama dan konflik sering dipahami dalam tiga cara: sebab, inspirasi, atau faktor yang memperburuk konflik antar-agama. Yang terakhir, agama, digunakan sebagai kendaraan untuk mengaktifkan konflik, yang, pada kenyataannya, tidak ada konflik agama murni di negara mana pun. Beberapa orang mengklaim agama adalah penyebab konflik kekerasan ketika para imam atau para pendeta (penafsir ajaran agama) telah mendefinisikan tujuannya. Misalnya, sebuah kelompok ingin mendirikan negara berdasarkan satu agama dalam masyarakat yang majemuk, atau ketika menginspirasi penindasan terhadap komunitas dengan merangkul agama yang berbeda dan membangun kelompok identitas eksklusif sebagai supremasi tembok yang memisahkan entitas berbeda. Selain itu, kelompok agama militan, melalui para *Jihadis* mereka, telah memperburuk makna agama sebagai sumber perdamaian. Yang lain menyarankan bahwa agama menginspirasi kekerasan dengan memberikan ideologi dan teks absolut yang mendukung perang suci. Di sini, pejuang agama terlibat dalam perjuangan kosmik antara yang baik dan yang jahat, menghadirkan makna dan mencegah kompromi. Sarjana lain berpendapat bahwa agama dapat disalahgunakan untuk memperburuk konflik ketika elit politik memanipulasi agama untuk mempolitisasi massa demi kepentingan mereka²⁸

Dialog antar-agama telah mempengaruhi hubungan internasional dan *sebaliknya*. Dua cerita di bawah ini menggambarkan fenomena tersebut²⁹. *Pertama*, Paus Benediktus XVI telah menyampaikan pidato di Universitas Rosenberg pada tahun 2006. Dia berbicara tentang “Iman, Akal dan Universitas: Kenangan dan Refleksi”. Pidatonya telah memberi impresi yang baik bagi para peserta yang mengikuti kuliah tersebut. Namun, pidatonya bergema di luar ruang kuliah karena Paus menyebutkan beberapa kutipan keras mengenai Nabi Muhammad dan Islam yang membuat umat Islam marah. Butuh waktu dua tahun untuk menyelesaikan ketegangan setelah dialog tingkat tinggi antara Vatikan dan para pemimpin Muslim dilakukan. *Kedua*, bergabungnya Turki ke Uni Eropa (UE) tidak mudah

²⁵R. C. Neufeldt. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change', *Peace & Change*, vol. 36, no. 3, pp, 2011, 344-372.

²⁶Muhammad Abu-Nimer. *Nonviolence and Peacebuilding in Islam: Theory and Practice*. (Gainesville: University Press of Florida, 2003).

²⁷Anas Alabbadi & Muhammad Abu-Nimer. *Hand out Training for KIFP Southeast Asia 2016*. (Austria: KAICIID, 2016).

²⁸R. C. Neufeldt. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change', *Peace & Change*, vol. 36, no. 3, pp, 2011, 346.

²⁹T. Banchoff. 'Interreligious Dialogue and International Relations' in TS SHAH, A STEPAN, A. & MD TOFT, (eds.), *Rethinking Religion and World Affairs*, pp. 204-216. London: Oxford University Press, 2012.

karena dua negara berpengaruh di UE, Jerman dan Prancis, telah melihat bahwa budaya Turki tidak sesuai dengan budaya UE yang didominasi oleh nilai-nilai sekuler. Juga, Islam di Eropa dikaitkan dengan, antara lain, ekstremisme, terorisme, ketidaktahuan.

Ada beberapa model dan paradigma dalam dialog antar-agama. Smith³⁰ menjelaskan sembilan model diskusi dialog antar agama di Amerika Serikat. Misalnya, model “persuasi” adalah model konservatif karena tidak mempromosikan pemahaman untuk menghormati pemahaman “yang lain”. Contoh lain, Model “*Get to Know You*”: “jenis dialog yang paling aman”, oleh karena mengundang Muslim atau Kristen untuk menjelaskan apa yang ingin diketahui para peserta. Sementara itu, ada tiga paradigma atau orientasi utama terkait perubahan yang terjadi melalui dialog: teologis, politik, dan pembangunan perdamaian.³¹ Sederhananya, dialog teologis berkembang dalam studi agama atau teologi, dialog politik dalam ilmu politik dan hubungan internasional; dan, dialog pembangunan perdamaian terkait transformasi konflik.

Dialog antar-agama berbasis teologi bertujuan untuk memahami para ulama, tokoh agama akar rumput, dan teolog, yang biasanya berbentuk makalah pertukaran, diskusi, panel tematik, dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk memahami “yang lain”. Mungkin kelemahannya, tidak membahas aspek politik yang sering menjadi dasar konflik yang terjadi. Sedangkan dialog politik agama bertujuan untuk menghasilkan koeksistensi atau harmoni sosial serta meningkatkan legitimasi aktor dan proses politik yang dirasakan. Dialog antar-agama, berdasarkan pembangunan perdamaian, bertumpu pada model dialog sebelumnya tetapi bergantung pada resolusi dan transformasi konflik. Dialog agama yang disebut terakhir memiliki empat tujuan: mengubah sikap dan persepsi orang lain, membangun rasa hormat dan saling pengertian, memperluas partisipasi dalam kegiatan pembangunan perdamaian; dan membangun kerangka kerja bersama untuk tindakan yang membahas akar konflik.

Dialog Antar-agama di Indonesia dengan Penekanan di Papua

Bagian ini menguraikan sejarah dialog lintas agama di Indonesia, dengan menekankan pada kondisi dan status dialog lintas agama di Papua dalam menyahuti fenomena radikalisme agama. Memang, menjadi pegiat atau aktivis dialog lintas agama berada dalam situasi yang tidak nyaman. Berbagai tuduhan acap ditujukan kepada para aktivis dialog antar-agama, misalnya, terhadap kebiasaan komunitas agama dan upaya mereka hanya mengarah pada sinkretisme agama dan budaya, dan percampuran agama. Singkatnya, dialog antar-agama adalah aib bagi umat beragama yang akan melemahkan keyakinan seseorang pada agama yang mereka anut.

Di Indonesia, ide dan praktik dialog lintas agama bukanlah hal baru. Itu telah muncul pada tahun 1969, di mana setelah peristiwa 1965-66, konflik antara komunitas agama, di mana Muslim dan Kristen mulai mengalami fragmentasi. Namun, praktik dialog antar-agama terdesentralisasi dan belum menemukan kerangka konseptual yang kuat. Mukti Ali, menteri agama (1972-1978), telah mengintensifkan inisiatif dialog antar-agama pada 1980-

³⁰R. C. Neufeldt. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change', *Peace & Change*, vol. 36, no. 3, pp, 2011.

³¹R. C. Neufeldt. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change'.

an. Sebagai contoh, ia berkontribusi mendorong pembukaan studi Perbandingan Agama di kampus IAIN *Sunan Kalijaga*, Yogyakarta. Namun, gagasan dialog antar agama pada waktu itu telah dikonstruksikan oleh negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu menciptakan hubungan antar-agama yang masih dipahami untuk membatasi pengaruh agama satu sama lain. Artinya, orang-orang dengan identitas agama tertentu harus memiliki semangat toleransi tanpa dipengaruhi oleh ajaran agama selain yang dia yakini. Singkatnya, penulis menganggap praktik dialog antar-agama model ini lebih merupakan dialog teologis yang dikembangkan dalam studi agama atau teologi. Seperti disebutkan di atas, tujuan dari model ini hanya untuk memahami “yang lain”. Mungkin kelemahannya, ia tidak membahas aspek politik yang sering menjadi dasar konflik yang terjadi, dan juga tidak menysasar resolusi konflik dan transformasi konflik ketika terjadi konflik komunal.

Hal lain adalah bahwa ruang-ruang dialog antar-agama yang dibangun selama pemerintahan Orde Baru lebih berorientasi pada pendekatan struktural daripada pendekatan budaya, yang mengakibatkan pergeseran aspek kekayaan budaya yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, wacana antar agama semakin memperkuat atribut agama formal dan komunal serta identitas agama sehingga meminggirkan unsur-unsur budaya yang juga penting untuk dikembangkan. Masyarakat cenderung memiliki kesadaran “religius” daripada kesadaran “budaya”. Akibatnya, tidak sedikit dari kita yang kehilangan identitas budaya dan kearifan lokal yang dianggap bukan bagian penting dari agama itu sendiri.

Dialog antar-agama di Papua tampaknya menjadi fenomena setelah bangkrutnya Orde Baru pada Mei 1998, terkait dengan kehadiran Islam transnasional yang telah mengancam kerukunan komunal di Papua. Secara historis, pada puncak konflik komunal antara umat Islam dan Kristen 1999-2001 di kota Ambon, pada saat yang sama Papua dikhawatirkan akan terjadi konflik antar agama. Oleh karena itu, untuk mencegah konflik serupa, para pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Para Pimpinan Agama (FKPPA) telah mendeklarasikan *Tanah Tanah Damai* Papua pada tanggal 5 Februari 2003, sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, setiap tanggal 5 Februari di Papua diperingati sebagai hari Papua Tanah Damai, yang juga mengacu pada masuknya Injil di Papua pada tanggal 5 Februari 1855, dan juga diperingati sebagai hari libur fakultatif.

Deklarasi tersebut dipicu oleh konflik komunal yang terjadi di luar Papua, terutama konflik di Ambon, Maluku, sehingga dapat dicegah untuk masuk ke Papua. Selain itu, kritik terhadap pemerintah gagal memberikan kesejahteraan, terutama aspek hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta penggunaan kekerasan yang berlebihan. Konflik komunal yang mereda di Indonesia dan Papua selamat dari efek domino konflik komunal. FKUB yang telah dibentuk pemerintah turut berkontribusi menjaga kerukunan dalam derajat yang aman.

Pada 17 Juli 2015 Indonesia dikejutkan oleh insiden Tolikara di Papua, dan polemik pembangunan masjid di Kota Manokwari Papua Barat, telah mengancam kearifan lokal yang telah tertanam jauh melampaui ratusan tahun yang lalu, dengan *Satu Tungku Tiga Batu* dan penghormatan terhadap rumah ibadah yang diyakini berdampak negatif bagi pelakunya. Dalam menghadapi intoleransi agama ini FKUB dan FKPPA telah memainkan

peran penting, termasuk menginisiasi perjanjian damai antara GIDI dan Muslim Tolikara pada 29 Juli 2015. Di tingkat kota, kelompok *Hizbut-Tabrir Indonesia* (HTI), sebelum resmi dibubarkan pada Juli 2017, harus meminta izin kepada FKUB untuk melakukan kegiatan publik yang melibatkan masyarakat. Bahkan, jika meminta izin dari FKUB, tampaknya mustahil bagi sebuah gerakan yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan promise isu khilafah agar negara ini diberikan izin kerumunan berupa parade kekhalifahan akbar.

Keberhasilan FKUB dan FKPPA dalam menjaga keselarasan juga meliputi networking dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. FKPPA telah menerima dana dari *Cordaid* sebelum dilarang beroperasi di Papua, sehingga kegiatannya benar-benar hidup, bahkan organisasi itu telah melakukan studi banding di Mindanao, wilayah yang bergejolak di Filipina. Dalam praktiknya, FKPPA telah berjejaring dengan Yayasan *Interfidei* Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan harmoni berupa FGD, seminar, dan konferensi baik lokal maupun nasional. Kendati demikian, sinergi FKUB dan FKPPA masih terbatas dan belum menjadi sinergi yang optimal. Terlepas dari kekurangannya, FKUB dan FKPPA telah menjadi “faktor positif yang mengintervensi” dalam mencegah konflik komunal yang brutal. Pengurus di FKUB juga merupakan pengurus FKPPA dan sebaliknya.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan FKUB, yang pernah dianugerahi sebagai pemenang ketiga “Harmony Award” dari Kementerian Agama RI, disertai dengan *coaching money*. Pertama, FKUB Papua secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi untuk kerukunan di berbagai kota di Papua. Kedua, FKUB Papua secara proaktif berupaya menjaga kerukunan umat beragama, menggunakan perdamaian, dialog, studi banding, dan pertukaran pengetahuan. Ketiga, FKUB Papua berjejaring dengan yayasan serupa yang memperjuangkan kegiatan toleransi dan harmoni. Namun, belum optimal dalam bekerja sama dengan semua lembaga serupa di Papua, yang masih cenderung terdesentralisasi.

Dalam konteks tanah air, upaya menjadikan dialog lintas agama sebagai instrumen perdamaian, khususnya resolusi konflik, sudah mulai dipraktikkan. Dalam hal ini, kredit secara khusus harus ditujukan kepada FKUB dan FKPPA, yang sering muncul sebagai kiper moral untuk mencegah konflik agama, seperti yang disebutkan di atas. Misalnya, upaya mereka dalam mengantisipasi pilkada pasca konflik yang rawan gesekan agama dan menengahi berbagai ketegangan antar agama harus diapresiasi, meskipun pendanaan dari pemerintah provinsi dan kota belum maksimal. Dalam hal ini, FKUB Papua telah memainkan peran penting, yaitu sebagai aktor di bidang pendidikan, advokasi, diplomasi ulama, observasi, pendampingan, pencari fakta, jabatan yang baik, konsiliasi, pemberian saksi, fasilitasi/mediasi dan saksi kebenaran.

Salah satu model dialog antar-agama yang cukup baik dan membahas masalah teologi, politik, dan pembangunan perdamaian, tanpa mengabaikan peran organisasi serupa, dilakukan oleh Yayasan *Interfidei*. Sebagai salah satu koordinator Jaringan Lintas Iman Indonesia (JAI) di Papua, penulis telah terlibat dalam pekerjaan *Interfidei* melalui pembuatan modul, pelatihan, konferensi, dll, di Papua. Penulis berpendapat bahwa Dialog Antar-agama dapat menjadi wahana untuk memaksimalkan agama sebagai sumber perdamaian.

Ruang pertemuan dialog lintas agama harus dikembangkan untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan sehingga dialog tidak hanya sebatas dialog untuk mengakui agama orang lain tetapi diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan praktis yang menjadi perhatian seluruh umat beragama. Model dialog mana yang tepat untuk komunitas, warga setempat yang paling tahu yang terbaik. Untuk mengkahiri bahasan ini, penulis akan menyajikan satu upaya menjaga kerukunan dan perdamaian di Papua, sebagai pengejawantahan dialog kehidupan dengan inisiasi “Zona Integritas Kerukunan Kabupaten Jayapura”.

Zona Integritas Kerukunan di Kabupaten Jayapura

Untuk melihat persoalan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di Papua dari sebuah perspektif yang lebih luas, bagian ini mendeskripsikan secara singkat Zona Integritas Kerukunan tersebut, tokoh yang menginisiasi dan ancaman terhadap zona kerukunan. Inisiasi Zona Integritas Kerukunan ini, sejatinya, bertujuan membangun komitmen kerukunan, dan juga menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia Internasional tentang kerukunan hidup beragama yang bisa dijadikan contoh yang baik seperti di Kabupaten Jayapura. Di sini, Muslim dan Kristen serta komunitas agama dan etnik dapat hidup berdampingan secara damai (ko-eksistensi) dan itu telah terjadi semenjak lama. Selain itu, penetapan “Zona Kerukunan Beragama” di Kabupaten Jayapura merupakan yang pertama kali di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menetapkan zona kerukunan pada saat menggelar dua kegiatan besar, yaitu *Musabaqah Tilawatil Quran* (MTQ) ke-26 tingkat Provinsi Papua dan *Pesta Paduan Suara Gerejawi* (Pesparawi) ke-1 Tingkat Kabupaten Jayapura. Pada 28 Mei 2016, atas nama masyarakat kabupaten Jayapura yang diwakili Pdt. Lambert Sarwuna (Protestan), Najib Muri (Islam), Pastor Hendrik Nahak (Katolik), Pandita Arya Bodhi Jasmani (Buddha), Rakhmat (Hindu), Ramses Ohee (Toko Adat), Daniel Toto (Tokoh Dewan Adat), Dra. Sipora Nelci Modouw (Tokoh Perempuan) dan Marshel Suebu (Tokoh Pemuda) Kabupaten Jayapura resmi dicanangkan sebagai Zona Integritas Kerukunan Beragama di Indonesia. Pencanangan ini ditandai dengan penabuhan alat musik tifa sepanjang 3,25m secara bersama-sama oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Bupati Jayapura Matius Awoitau, dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Jannus Pangaribuan.

Terdapat empat komitmen di dalam nota kesepahaman Zona Integritas Kerukunan tersebut:

1. Pencanangan Zona Integritas Kerukunan ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Jayapura.
2. Nilai-nilai kerukunan di antara masyarakat, antar kelompok masyarakat, dan antar masyarakat dan pemerintah adalah pengejawantahan dari Kebhinekaan Tunggal Ika yang mewujudkan dalam 'menambai umbai' yang berarti: 'satu utuh, ceria berkarya meraih kejayaan'.
3. Dalam pemahaman kerukunan seiring semangat 'etik global', termasuk di dalamnya pilar kedamaian yang dilandasi: kebenaran berdasarkan Kebenaran Tuhan,

menghargai martabat setiap orang, keadilan dan penghormatan hak azasi manusia, kesungguhan dan keikhlasan hati, kasih antara manusia tanpa diskriminasi, kebebasan yang bertanggungjawab, dan doa yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan penduduk lain yang datang ke wilayah Kabupaten Jayapura, wajib menghormati dan melaksanakan integritas kerukunan ini.

Kabupaten Jayapura memiliki moto yaitu, *Kenambai Umbai*, yang artinya Satu Hati, Ceria Berkarya Meraih Kejayaan. Moto ini tampaknya sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Jayapura. Lebih jauh, moto ini telah menginspirasi dan menyemangati Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam merancang sebuah komitmen Zona Integritas Kerukunan Antarumat Beragama di kabupaten Jayapura. Zona tersebut telah ditandatangani pada 28 Mei 2016, dan juga telah memperoleh pujian, sanjungan dan apresiasi yang hebat dari Pemerintah Pusat. Makna penting Zona Integritas ini sangat strategis dan bisa menjadi percontohan, oleh karena tercatat yang pertama kali di Indonesia, yang dewasa ini kencang dihantam badai intoleransi dan radikalisasi yang mengancam kerukunan beragama.

Figur penting yang mewujudkan kawasan kabupaten Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan, yaitu Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Karenanya, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) telah menganugerahkan penghargaan kepada Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, *Harmoni Award 2017*. Dengan kata lain, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin telah memberikan penghargaan kepada Awoitauw, oleh karena Pemkab Jayapura telah membuat rintisan nyata untuk menjaga kerukunan umat beragama. Menurut Saifuddin, “Zona integritas merupakan bagian penting dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang tentunya harus dikawal dan dilaksanakan dengan baik”.³²

Sementara itu, Awoitauw mengharapkan agar zona integritas bisa menjelma nyata dalam kehidupan masyarakat. Lebih jauh, Awoitauw, menyatakan bahwa jauh sebelum dicanangkannya zona integritas, pihaknya sudah mempunyai *Forum Kerukunan Umat Beragama* (FKUB) yang aktif bekerja. Sementara penghargaan *Harmoni Award 2017* dari Kemenag RI, pak Bupati mengungkapkan bahwa penghargaan itu bukan untuk dirinya saja, melainkan juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura, yang telah menjunjung tinggi zona integritas kerukunan beragama di kabupaten itu. Singkatnya, melalui penghargaan tersebut Pemkab akan terus mendorong komitmen seluruh komponen masyarakat dan berbagai lapisan suku bangsa dan agama di Kabupaten Jayapura meningkatkan kerukunan antarumat beragama.

Kasus Menara Masjid Al-Aqsha: Ujian bagi Zona Integritas Kerukunan

Pada Mei 2018, Zona Integritas Kerukunan di kabupaten Jayapura malah menghadapi batu sandungan ujian. Ini terlihat jelas dari sikap Persekutuan Gereja-Gereja Di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang menghendaki “penghentian pembangunan Menara

³²Pernyataan Lukman Hakim Saifuddin dikutip dalam buku Pernyataan Yoku dan Toni dikutip dalam Ridwan Al-Makasary pada buku “*Papua Kekerasan, Keadilan dan Dialog*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022).

masjid *Al-Aqsha* dan juga menurunkan tinggi gedung masjid *Al-Aqsha* sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya”.

Lebih jauh, pada surat tertanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani 15 pendeta PGGJ memuat delapan poin: 1. Bunyi Adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid. 2. Tidak diperkenankan berdakwah di seluruh tahanan Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura. 3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu. 4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti mushala-mushala pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah. 5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mesjid-mesjid dan mushala-mushala. 6. Pembangunan rumah-rumah ibadah di Kabupaten Jayapura WAJIB mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah. 7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya. 8. Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura WAJIB menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura. Berdasar pada delapan poin ini mereka menghendaki “penghentian pembangunan menara masjid *Al-Aqsha*”. Penulis telah membahas bagaimana melihat fenomena ini dari aspek yang luas di tulisan sebelumnya³³, di sini penulis fokus pada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemkab Jayapura.

Untuk menyelesaikan kisruh “pelarangan pembangunan menara masjid”, maka telah dicapai kesepakatan pada saat usai rapat Koordinasi *Forum Komunikasi Umat Beragama* (FKUB) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan membentuk tim enam yang akan segera bekerja mencari solusi. Tim enam terdiri dari: Pdt. Alberth Yoku, Sth sebagai ketua, yang dibantu lima anggota yaitu, Dr. H. Toni Wanggai, S.Ag, MA; Drs. KH. Umar Bauw Al-Bintuni, MM; Pdt Hosea Taudufu, Sth; Pdt. Robbi Depondoiy, S. Th dan Nurdin Sanmas, SH.I.

Tim Enam yang dibentuk menyelesaikan masalah ini sudah menyelesaikan tugas dan telah mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan tersebut lantas diserahkan kepada Bupati Jayapura Mathius Awoitaw dalam Rapat Kerja Tim Mediasi Kerukunan Umat Beragama, di aula Kantor Bupati Jayapura. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Enam telah bekerja dengan baik, terutama berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketua Tim Enam, Pdt Albert Yoku mengatakan, salah satu poin kesepakatan yaitu pembangunan Menara masjid Agung *Al-Aqsha* Sentani, tingginya disamakan dengan kubah masjid. “Pedoman kami, pada surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X. Selisih biaya ketinggian menara menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jayapura, sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,” ucap Yoku. Senada dengan itu, menurut Toni Wanggai, komisioner MRP Pokja Agama,

³³Ridwan Al-Makassary, 2019. *Islam Transnasional Di Tanah Papua: Proyek Jihad Ja'far Umar Thalib, Kontroversi Menara Masjid Sentani, Hizbut Tabrir Indonesia (Transnational Islam In The Land Of Papua: Ja'far Umar Thalib Jihad Project, Sentani Mosque Minaret Controversy, Hizb Ut-Tabrir Indonesia)*. (Jayapura: Majelis Rakyat Papua, 2019).

sekarang tinggal realisasi dari hasil kesepakatan yang telah dirumuskan oleh tim enam. “Kuncinya di Bupati untuk pencairan dana untuk perataan menara sesuai dengan tinggi kubah masjid”. Sesuai kesepakatan pihak masjid *Al-Aqsha* telah menurunkan tinggi menara sesuai kubah masjid dan masalahnya telah selesai, berdasarkan informasi terakhir dari pengurus masjid ketika penulis menyambangi masjid tersebut³⁴.

Kesimpulan

Narasi kehidupan beragama di Papua awalnya berjalan harmonis sebelum tahun 1998, sebelum terjadi pergeseran komposisi penduduk dengan kehadiran transmigran Muslim beraliran radikal yang menimbulkan ketegangan dengan sesama Muslim dan non-Muslim. Kondisi tersebut memperburuk situasi konflik politik di Papua yang telah berlangsung lama sejak 1960-an. Dengan demikian, kerukunan beragama di Papua telah berada dalam bahaya ketika gerakan Islam transnasional, sebagian radikal, ingin mewujudkan negara Islam dan kekhalifahan global, yang telah menciptakan ketegangan dan bahkan ancaman terhadap keharmonisan komunal, yang dapat memperburuk pembangunan perdamaian di Papua. Hubungan antar agama di Papua yang unik dan diwarnai oleh berbagai ketegangan merupakan bukti nyata bahwa Papua memerlukan dialog antar-iman untuk perdamaian. Secara praktis, FKUB dan PKPPA telah berhasil menjaga kerukunan dengan model dialog antar agama yang mereka lakukan bekerjasama dengan masyarakat sipil, sebagaimana disebutkan di atas. Namun, pendekatan yang digunakan masih mengadopsi satu model dialog konvensional yang tidak cukup melibatkan pemuka agama akar rumput. Selain itu, para aktivis dialog antar-agama hanya berurusan dengan aspek teologis dan ideologis semata daripada bekerja sama memecahkan masalah sosial. Oleh karena itu, inisiatif dialog lintas-agama di Papua harus lebih diperkuat dengan melibatkan para pemimpin agama akar rumput dan tidak hanya berfokus pada isu ideologis dan teologis, yang sudah cukup memadai dilakukan. Model Zona Integritas Kerukunan adalah satu upaya dialog antar-agama yang cukup baik untuk harmoni komunal dan dapat direplikasi dengan modifikasi di tempat-tempat lain, di luar tantangan yang dihadapinya dalam konteks Kabupaten Jayapura. Selain itu, sudah saatnya agenda dialog antar-agama lebih banyak mempengaruhi kolaborasi antar umat beragama untuk menyelesaikan masalah sosial.

Daftar Pustaka

- Abu-Nimer, Muhammad, “A Framework for Nonviolence and Peacebuilding in Islam”. *Journal of Law and Religion*, Vol. 15, no.1 & 2, 2000.
- _____, *Nonviolence And Peacebuilding In Islam: Theory And Practice*. Gainesville: University Press of Florida, 2003.
- Alabbadi, Anas & Abu-Nimer, Muhammad, *Hand out Training for KIFP Southeast Asia 2016*. Austria: KAICIID, 2016.

³⁴Pernyataan Yoku dan Toni dikutip dalam Ridwan pada buku “*Papua Kekerasan, Keadilan dan Dialog*”. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022.

- Al-Hamid, Idrus. "Islam Politik di Papua: Resistensi dan Tantangan Membangun Perdamaian". *Millah*, XII, no. 2, 2013.
- Al-Makassary, Ridwan, *Masjid dan Pembangunan Perdamaian di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN, 2010.
- _____, Examining Jakarta Office Mosques: Islamic Teaching Practices And Views Of Islamic Ideological Issues. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(1), 2013.
- _____, *Dialog Dan Radikalisme Agama Di Tanah Papua (Dialogue And Radicalism In The Land Of Papua)*. Jayapura: FKUB Papua, 2016.
- _____, *Insiden Tolikara Dan Jafar Umar Thalib Kontroversi Mushalla Yang "Dibakar" Dan Drama Jihad Di Tanah Papua*. Jayapura: Kementrian Agama Papua, 2017.
- _____, *Islam Transnasional Di Tanah Papua: Proyek Jihad Ja'far Umar Thalib, Kontroversi Menara Masjid Sentani, Hizbut Tabrir Indonesia (Transnational Islam In The Land Of Papua: Ja'far Umar Talib Jihad Project, Sentani Mosque Minaret Controversy, Hizb Ut-Tabrir Indonesia)*. Jayapura: Majelis Rakyat Papua, 2019.
- _____, *Papua Kekerasan, Keadilan dan Dialog*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022.
- Appleby, R. S. *The Ambivalence of The Sacred*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000.
- Banchoff, T. 'Interreligious Dialogue and International Relations' in TS SHAH, A STEPAN, A. & MD TOFT, (eds.), *Rethinking Religion and World Affairs*. London: Oxford University Press, 2012.
- Bielefeldt, H. 'Misperceptions of Freedom of Religion or Belief'. *Human Rights Quarterly*, vol. 35, no. 1, 2013.
- Bowen, J. R. Beyond Migration: Islam as a transnational public space. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 30(5), 2004.
- Celso, A. N. Zarqawi's Legacy: Al-Qaeda's ISIS "Renegade". *Mediterranean Quarterly*. 26(2), 2015.
- Chauvel, R., & Bhakti, I. The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies. *Policy Studies*, (5), 2004.
- Coward, H. *Religion and peacebuilding*. Albany: State University of New York Press, 2004.
- Esposito, Jhon. L, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2002.
- Galtung, J. & Dietrich, F. *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*, Heidelberg: Springer, 2014.
- Hasan, N. *Laskar Jihad: Islam, militansi, dan pencarian identitas di Indonesia pasca orde baru*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Hernawan, B. J. *Torture and peacebuilding in Indonesia : the case of Papua*. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018.
- International Crisis Group. *Indonesia: Communal tensions in Papua*, Asia Report No. 154, 16 June, 2008
- Laderach, J. P. *Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring and Learning Toolkit*. Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame and Catholic Relief Services Southeast, East Asia Regional Office, 2007.
- Mandaville, P. Muslim transnational identity and state responses in Europe and the UK after 9/11: Political community, ideology and authority. *Journal of Ethnic and Migration Studies: Muslims and the State in the Post-9/11 West*, 35(3), 2009.

- Moshood, A.B., & Thovoethin, P.S. Insurgency and Development in Nigeria: Assessing Reintegration Efforts in the North-East, *Journal of Peacebuilding & Development*, 12(2), 2017.
- Muridan, S. W. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta: Yayasan Obor, 2010.
- Neufeldt, R.C. 'Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change', *Peace & Change*, vol. 36, no. 3, 2011.
- Noor F.A. The Tablighi Jama'at in West Papua, Indonesia: The Impact Of A Lay Missionary Movement In A Plural Multi-Religious And Multi-Ethnic Setting. In J. Finucane and R. M. Feener (Eds.), *Proselytizing and the limits of religious pluralism in contemporary Asia*, Singapore: Springer, 2014.
- Ozerdem, A., & Sung Yong, L. *International Peacebuilding: An Introduction*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2015.
- Prickett, S. (February 1), 'Christianophobia: A Faith under Attack'. *International journal for the Study of the Christian Church*. Taylor & Francis Group, 2013.
- Rahmat, I. *Islam Indonesia Islam paripurna; pergulatan Islam pribumi dan Islam nusantara*, Jakarta: Omah Aksoro dan Forum Silaturahmi Bangsa, 2017.
- Shah, T, Stepan, A, & Toft, M. *Rethinking Religion and World Affairs*. London: Oxford University Press, 2012.
- Smith, J.I. 'Models of Christian-Muslim Dialogue in America.' In *Muslims, Christians, and the Challenge of Interfaith Dialogue*, by Smith, Jane I.. New York: Oxford University Press, 2012.
- Tebay, N. 'Papua, the Land of Peace': The Interfaith Vision and Commitment for West Papua. *Exchange*, 36, 2007.
- Toft, M.D. 'Religion, Terrorism, and Civil Wars. Rethinking Religion and World Affairs' in TS SHAH, A STEPAN, A. & MD TOFT, (eds.), *Rethinking Religion and World Affairs*. London: Oxford University Press, 2012.
- Van Bruinessen, M. (Ed.). *Contemporary Developments in Indonesian Islam*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.